

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang lebih dulu dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1980.

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna atau *user* suatu sistem informasi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*).

Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*Perceived Easy Of Use*) mempengaruhi sikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Attitude*) individu terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Intention*). Niat untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan apakah individu akan menggunakan teknologi informasi (*Behavior*).

- a) *Perceived Usefulness* adalah suatu fase dimana seseorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegunaan dari penggunaan teknologi informasi komunikasi dapat menambah kinerja, prestasi kerja siapapun yang menggunakannya.
- b) *Perceived Ease of Use* adalah sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwasanya penggunaan sistem tertentu, mampu mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Frekuensi penggunaan dan interaksi antara pengguna (*user*) dengan sistem juga mampu menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.

2.2 Task Technology Fit (TTF)

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). *Task Technology Fit* (TTF) menjelaskan bagaimana teknologi berdampak dalam membantu individu mengerjakan tugas. Secara langsung teori ini berpegang bahwa teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan jika kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas-tugas yang harus dihasilkan oleh pengguna. *Task Technology Fit* (TTF) merupakan korespondensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara tugas, kemampuan individu, dan fungsi teknologi. Artinya kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas tersebut didukung adanya fungsi dari teknologi.

Menurut Goodhue dan Thomson (1995) keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan bergantung pada pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan bagi pemakai, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Goodhue dan Thomson (1995) menyatakan bahwa pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang positif tidak hanya karena karakteristik sistem yang melekat, tetapi lebih pada sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan tugas pemakai. Maka dalam penelitian ini *Task Technology Fit* (TTF) digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga bahwa tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang diberikan *e-Nofa* sehingga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-Nofa* tersebut bahkan secara berkelanjutan (intensitas), Desmayanti (2012) juga mengatakan wajib pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan suatu sistem teknologi maka mereka akan menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.

2.3 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*). Dimana menurut Chau dan Hu (2002) konstruk ini ditambahkan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu.

Model Theory of Planned Behavior (TPB) terdiri dari tiga faktor utama yaitu keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan (*control beliefs*). Kemudian ketiga faktor tersebut menimbulkan adanya minat (*intention*) yang selanjutnya akan menentukan apakah individu akan menggunakan sistem tersebut atau tidak secara berkelanjutan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) yaitu hal-hal yang diyakini individu mengenai siap atau tidak siap untuk melakukan perilaku tersebut. Yang artinya, individu yakin akan keamanan dan kerahasiaan suatu teknologi sehingga individu dan tidak akan ragu lagi dalam menggunakan teknologi tersebut sedangkan dalam kesiapan teknologi setiap individu yang siap menerima teknologi informasi Wajib Pajak maka individu tersebut akan memutuskan untuk menggunakan secara berkelanjutan

2.4 Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

1. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.4.2 Fungsi Pajak

Menurut pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2009, hal. 1), pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

- Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Kepatuhan

Rahayu (2010, hal. 139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

2.4.4 Kriteria Pengusaha Pajak Patuh

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Menurut Muljono (2008, hal. 1) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

d. Tarif PPN

- Tarif PPN adalah 10%
- Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
 - Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.
 - Ekspor BKP tidak berwujud.
 - Ekspor Jasa Kena Pajak.
- Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
- Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%.

e. Cara Perhitungan PPN

Adapun cara penghitungan PPN yaitu :

PPN terutang = tarif x Dasar Pengenaan Pajak (harga jual)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.6 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Muljono (2008, hal. 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.4.7 Faktur

PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

2.5 Elektronik Penomoran Faktur (e-NOFA)

2.5.1 Pengertian e-Nofa

Maraknya kasus faktur pajak fiktif yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus mencari cara untuk membenahi sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu langkah

penertiban yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah pengembangan *e-Nofa* yaitu sebuah aplikasi elektronik untuk penomoran faktur pajak.

Kalau dulu pengusaha kena pajak (PKP) dapat menomori sendiri faktur pajaknya, kini nomor faktur pajak ditentukan oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi *e-Nofa* ini. Aplikasi yang mulai dapat digunakan sejak 1 Juni 2013 lalu ini akan dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan dalam penomoran faktur pajak. Pembuatan *e-Nofa* melibatkan Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB), Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP).

PKP tinggal mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata sandi (*password*) ke kantor pajak setempat. Kode aktivasi akan dikirim melalui pos sedangkan kata sandi akan dikirim lewat e-mail.

Setelah itu PKP dapat langsung mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak ke kantor pajak dimana PKP terdaftar. PKP kemudian akan diminta untuk menginput kode aktivasi dan kata sandi ke komputer yang tersedia di kantor pajak dan nomor faktur pajak akan didapatkan.

Tidak semua PKP dapat memperoleh nomor faktur pajak melalui *e-Nofa*, hanya pengusaha yang tertib melakukan registrasi dan verifikasi serta dipercaya keberadaannya saja yang dapat memperolehnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain sebagai langkah penertiban, *e-Nofa* juga merupakan bentuk modernisasi system perpajakan yang tengah digencarkan oleh Ditjen Pajak. Dengan adanya aplikasi ini pengawasan terhadap wajib pajak juga dapat terbantu.

Pengusaha kena pajak tidak bisa lagi mendaftarkan alamat fiktif untuk tempat usahanya karena semuanya akan terdeteksi melalui *e-Nofa*. Penomoran faktur pajak pun lebih valid dan dapat ditelusuri dibandingkan secara manual.

E-Nofa bukan hanya memudahkan Ditjen Pajak dalam pengawasan tapi juga akan mempermudah proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak atau PKP yang telah meregistrasikan dirinya.

Ditjen Pajak terus melakukan pembenahan dalam sistem administrasi dan member kemudahan bagi wajib pajak. Sebagai langkah selanjutnya Ditjen Pajak akan mengembangkan *e-Tax Invoice* untuk mewujudkan sistem administrasi pajak yang lebih efisien.

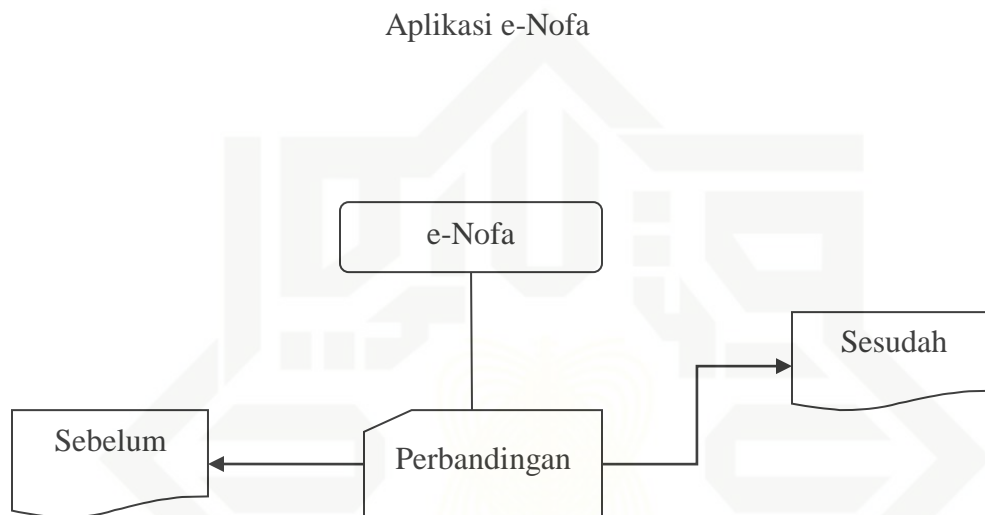
E-Nofa adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada PKP yang digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak secara online, fasilitas ini memudahkan WP dalam memina nomor seri faktur pajak secara online, jadi WP tidak perlu lagi untuk datang langsung ke kantor pajak dimana WP tersebut terdaftar hanya untuk sekedar meminta nomor seri faktur pajak, hanya tinggal menghubungkan ke internet maka WP sudah bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak (Wanda : 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun flowchart perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi *e-Nofa* sebagai berikut :

Gambar 2.1 Flowchart Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pemakaian



2.5.2 Tujuan diterapkan *e-Nofa*

Penerapan *e-Nofa* adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

Antara lain :

1. Tanda tangan basah diganti tanda tangan elektronik.
2. *E-Nofa* Pajak tidak harus untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan (*clerical/Administration cost*).
3. Aplikasi *e-Nofa* Pajak satu kesatuan dengan aplikasi *e-SPT*, sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT masa PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Permintaan nomor seri faktur pajak disediakan secara online via website Direktorat Jendral Pajak sehingga tidak perlu datang lagi ke KPP.

Sedangkan bagi DJP, penerapan *e-Nofa* pajak meningkatkan validitas faktur pajak sekaligus berfungsi sebagai *collecting* data penyerahan BKP/PKP melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirim seluruh data keterangan faktur pajak ke sistem DJP untuk mendapatkan persetujuan dari DJP (*approval*). *E-Nofa* Pajak tanpa *approval* dari DJP bukan merupakan faktur pajak.

2.6 Kajian Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Usyr* atau *Al-Mals*, atau juga bisa disebut *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para pemungut pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut *Shahibul Mals* atau *Al-Asyrrar*.

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum, Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29 :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah : 29)

Jizyah disini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dari mereka.

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Fransisca Yaniangwati (2013)	Implementasi Elektronik Nomor Faktur (<i>e-Nofa</i>) Pajak dalam Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak	Hasil nilai uji statistik dari Kepatuhan wajib pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil ada beda yaitu setelah menggunakan <i>e-Nofa</i> lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			baik dari pada menggunakan secara manual, sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda yaitu sebelum dan setelah menggunakan <i>e-Nofa</i>
2	Okutu Wanda Gisbu (2015)	Pengaruh Modernisasi <i>e-Nofa</i> Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur di KPP Ilir Timur	Hasil dari penelitian ini yaitu modernisasi sistem <i>e-Nofa</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penomoran faktur di KPP Ilir Timur.
3	Emi Rahmawati (2013)	Penerapan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per- 24/Pj/2012 tentang <i>e-Nofa</i> bagi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bangkalan	Menunjukkan bahwa peranan KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang <i>e-Nofa</i> sebagian besar sudah cukup baik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4	Ita Salsana Lingga (2015)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> PPN terhadap Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama “X”	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan <i>e-SPT</i> PPN menurut persepsi Wajib Pajak sudah baik dan efisien.
5	Ni Luh Supadmi (2013)	Pengaruh Efektivitas <i>e-SPT</i> Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Barat	1.Sistem pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (<i>e-SPT</i> Masa PPN) tergolong ke dalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. 2.Efektivitas penerapan <i>e-SPT</i> Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada

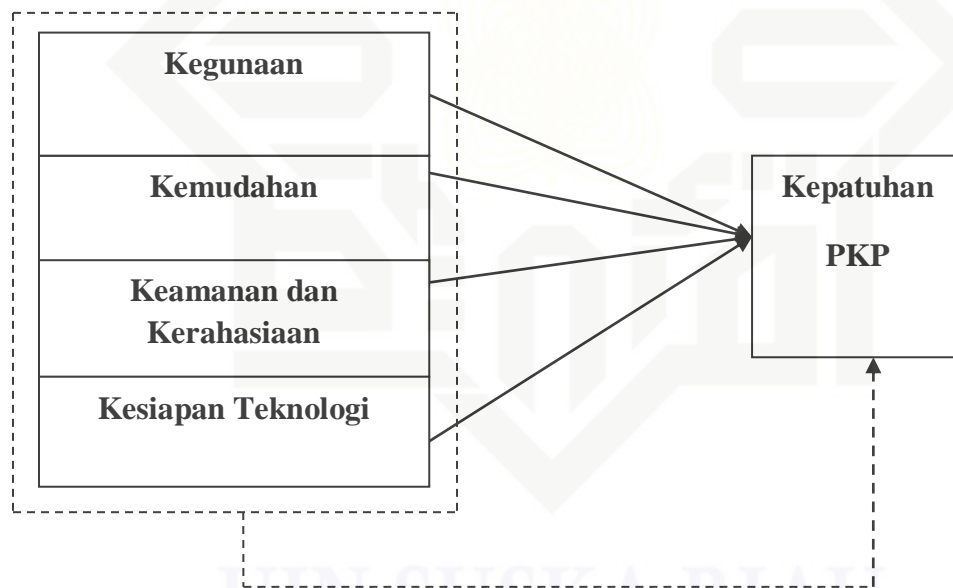
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
--	--	--	---

2.8 Kerangka Konseptual

Didasari oleh uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi aplikasi *e-Nofa* terhadap kepatuhan PKP dalam penomoran faktur.



Keterangan :



= Uji secara Parsial

= Uji secara Simultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Hipotesis

Hipotesis penelitian (*research hypothetical*) ini berkenaan dengan penelitian yang kita ajukan untuk memprediksi kemungkinan yang juga merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang kita ajukan (Trianto, 2015).

- **Hubungan kegunaan sistem *e*-Nofa terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur**

Kegunaan teknologi dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberi manfaat terhadap peningkatan performa kinerja. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kebermanfaatan mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Behavior*). Penelitian yang dilakukan oleh Yaniangwati (2013) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan *e*-Nofa. Dan didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti (2013) bahwa penggunaan *e*-Nofa berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama yang akan diuji yaitu :

H₁ = Kegunaan *e*-Nofa berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Hubungan kemudahan sistem *e-Nofa* terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur**

Kemudahan yaitu mempersiapkan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan berupa beban bagi para wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dikatakan persepsi kemudahan mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Behavior*).

Penelitian yang dilakukan oleh Wanda (2015) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kemudahan pemakaian *e-Nofa*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewi (2009) bahwa persepsi kemudahan mempengaruhi minat. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua yang akan diuji yaitu :

H₂ = Kemudahan *e-Nofa* berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur.

- **Hubungan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Nofa* terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur**

Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman resiko hilangnya data atau informasi itu sangat kecil dan resiko pencurian rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) individu yakin akan keamanan dan kerahasiaan suatu teknologi sehingga individu tidak akan ragu lagi dalam menggunakan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda (2015) menunjukkan bahwa persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap kemudahan pemakaian *e-Nofa*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yang akan diuji yaitu :

H₃ = Keamanan dan kerahasiaan *e-Nofa* berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur.

- **Hubungan kesiapan teknologi sistem *e-Nofa* terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur**

Kesiapan teknologi pada dasarnya di pengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal *e-filling*. Menurut *Theory of Planned Behavior*(TPB) setiap individu yang siap menerima teknologi informasi wajib pajak maka individu tersebut memutuskan akan menggunakan secara berkelanjutan. Penelitian yang di lakukan oleh Desmayanti (2012) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna fasilitas *e-Filling* oleh wajib pajak sebagai sarana penyampain SPT masa secara *online* dan *realtime* menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil bahwa persepsi kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap pengguna *e-Filling*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat yang akan diuji yaitu :

H₄ = Kesiapan teknologi *e-Nofa* berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur.

- **Hubungan kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan dan kesiapan teknologi sistem *e-Nofa* terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur**

Kegunaan teknologi dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberi manfaat terhadap peningkatan performa kinerja. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kebermanfaatan mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Behavior*). Sedangkan Kemudahan yaitu mempersiapkan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan berupa beban bagi para wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dikatakan persepsi kemudahan mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Behavior*). Selanjutnya Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman resiko hilangnya data atau informasi itu sangat kecil dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) individu yakin akan keamanan dan kerahasiaan suatu teknologi sehingga individu tidak akan ragu lagi dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya Kesiapan teknologi pada dasarnya di pengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal *e-filling*. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) setiap individu yang siap menerima teknologi informasi wajib pajak maka individu tersebut memutuskan akan menggunakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima yang akan diuji yaitu :

H₅ = Kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan dan kesiapan teknologi *e*-Nofa berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur